

Penguatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo

Makmur¹, Jumardi², Muhammad Amar³, Fajaruddin⁴, Sitti Fatimah⁵

¹Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, Indonesia

²Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, Indonesia

³Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, Indonesia

⁴Sistem Teknologi Informasi, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, Indonesia

⁵Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, Indonesia

Corresponding Author : makmur.onti@gmail.com

Abstract. The strengthening and development of the rural economy has long been a strategic agenda of the government, one of which is through the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). This study aims to describe the role of BUMDes in strengthening the village economy in Lamatti Riaja Village, Bulupoddo Subdistrict. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the presence of BUMDes has had a positive impact, particularly in enhancing the local economy. The village government has implemented business development strategies based on local potential, such as tofu production, karaoke rental services, and the management of community halls (*baruga*). These business units not only help meet community needs but also open opportunities for public participation, especially among youth, in managing BUMDes activities. The active involvement of local residents has contributed to increasing their income. However, the study also identified a challenge: limited public understanding of the BUMDes concept and its significance. This highlights the need for the village government to intensify outreach and education efforts to ensure broader awareness and support from all residents, reinforcing BUMDes as a pillar of rural economic empowerment.

Keywords: Economic empowerment, BUMDes.

Abstrak. Penguatan dan pengembangan dasar ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program salah satunya adalah bumdes. Bumdes dalam penguatan ekonomi desa mampu memberikan penghasilan dengan tujuan penelitian ini Penguatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan uraian yang jelas secara keseluruhan dari permasalahan yang ada mengenai Penguatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lamatti Riaja. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Penguatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo sudah memberikan dampak positif bagi desa terutama dalam penguatan ekonomi dengan alasan dari segi strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam menjalankan BUMDes guna untuk meningkatkan ekonomi desa seperti adanya usaha industri dan usaha sewa melalui BUMDes. Selain itu Semenjak adanya BUMDes yang di mana ada usaha industri tahu dan industry sewa karaoke serta baruga, masyarakat dimudahkan dalam memenuhi kebutuhannya, selain itu juga mereka sebagai pemuda dan masyarakat diikut sertakan dalam menjalankan usaha BUMDes sehingga keterlibatan pemuda dan masyarakat dapat menambah pendapatan mereka. Meskipun ada beberapa kendala seperti masih ada masyarakat yang belum paham dan belum mengetahui seperti apa itu BUMDes dan bagaimana pentingnya terhadap desa. Akan tetapi itu menjadi evaluasi bagi pemerintah desa ke depannya bagaimana, mampu mensosialisasikan mengenai BUMDes kepada seluruh masyarakat desa Lamatti Riaja

Kata Kunci: Penguatan ekonomi, BUMDes

Received apr 26, 2025; Revised may 08 2025; Accepted Jun 24, 2025

* Makmur, e-mail address: makmur.onti@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi ditingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Sebuah kabupaten dikatakan memiliki ekonomi yang baik jika adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Dengan hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di seluruh tingkat pembangunan dan keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Tak hanya itu, apabila ekonomi di pedesaan baik maka akan memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Pembangunan nasional dilakukan dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah- daerah kecil dalam rangka negara kesatuan seperti halnya pada desa merupakan Sembilan program Nawacita dan wakil presiden Indonesia. Langkah ini dipandang strategis untuk menjadi pijakan dalam menciptakan Negara yang makmur dan juga menjadi tonggak dalam menghadapi persaingan global saat ini.

Penguatan dan pengembangan dasar ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun berbagai upaya tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan, intervensi yang terlalu besar yang dilakukan pemerintah menjadi salah satu faktornya. karena melalui intervensi yang besar justru mengakibatkan terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam menjalankan ekonomi desa. Masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Dalam persaingan ekonomi global yang semakin meningkat saat ini, banyak pelaku ekonomi yang memiliki peran dalam proses pertumbuhan dan berkembangnya Desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong ekonomi Desa melalui kewirausahaan Desa, dimana kewirausahaan Desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016). Kewirausahaan Desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat Desa (Prabowo, 2014).

Badan Usaha milik Desa merupakan strategi baru yang sedang sengit dalam mendorong dan menggerakkan perekonomian Desa (Teropong, 2018). BUMDes juga merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun dimasyarakat desa. BUMDes menjadi tempat atau wadah usaha bagi pemerintah Desa dan warganya yang secara proporsional melangsungkan kegiatan pembangunan ekonomi lokal ditingkat Desa (Teropong, 2018). BUMDes dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi perbincangan, sebab keberadaan BUMDes mempunyai peran yang strategis ditengah-tengah masyarakat khususnya di pedesaan. Badan usaha milik desa ini juga berdasarkan kepada Permendagri nomor 39 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Jika dicermati secara seksama hakikat BUMDes tidaklah semata-mata menjadi lembaga ekonomi yang bersifat komersial, akan tetapi juga sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sentosa Sembiring, 2017)

Keberadaan BUMDes di Desa Lamatti Riaja merupakan suatu keuntungan masyarakat dan pemerintah Desa untuk memberikan sumbangsih terhadap penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. (Sutoro Eko, Dkk. 2014). BUMDes lahir sebagai salah satu program baru dalam upaya meningkatkan perekonomian Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing Desa. BUMDes diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan

perekonomian Desa. Dalam undang-undang BUMDes terdapat aspek penekanan dimana pemerintah Desa dan masyarakat melakukan kegiatan perekonomian dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri. (Teropong, 2018).

Tujuan akhir dari BUMDes diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi Desa. sehingga tidak ada ketentuan bagaimana cara agar Desa lebih sejahtera, semua harus kembali dengan apa yang dimiliki Desa dan bagaimana mengembangkan potensi tersebut. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan pemerintah.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, yaitu dari Desa, oleh Desa, dan untuk Desa, sedangkan sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan. (Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014). Maka dari itu prinsip pengelolaan BUMDes dalam penguatan ekonomi Desa di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Namun membangun ekonomi produktif melalui BUMDes pada kenyataan masih sulit diwujudkan masyarakat desa. Desa belum menemukan cara yang tepat dalam mewujudkan kinerja pengelolaan BUMDes yang efektif.

Pengelolaan BUMDes yang baik akan menambah Pendapatan Asli Desa yang akan menjadi penghasilan utama desa serta dapat membantu dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, pemerintah Desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian Desa yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, peningkatan PAD, menghasilkan barang dan jasa substitusi Desa, meningkatkan perdagangan dan memberikan pelayanan yang optimal bagi konsumen, sehingga BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan desa dan meningkatkan perekonomian Desa. Tujuan akhir dari BUMDes sebagai instrumen diharapkan mampu menjadi prime over dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi Desa dan sebagai modal social (Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes. 2007).

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo, modal BUMDes masih terbilang sedikit sehingga BUMDes terkendala oleh modal, kegiatan BUMDes hanya menyediakan pelayanan jasa penyewaan sehingga sulit meningkatkan PAD dikarenakan hasil pendapatan akan disisihkan untuk biaya penyusutan barang saja. Karena kegiatan BUMDes tersebut bukan termasuk dalam potensi yang ada Desa jadi pencapaian sasaran kurang maksimal padahal pemberian modal BUMDes sangat berpengaruh besar apabila nantinya anggaran Dana Desa sudah tidak ada lagi.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teori penguatan, dimana Penguatan ekonomi Desa sendiri adalah sebuah proses penguatan dengan menggunakan usaha sebagai alat yang dibentuk untuk meningkatkan perekonomian Desa, meliputi peningkatan terhadap PAD, penyerapan tenaga kerja dari masyarakat Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul Penguatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo.

Penelitian ini difokuskan pada pemahaman bagaimana penguatan ekonomi Desa melalui BUMDes di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo. Objek penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Lamatti Riaja. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu Bagaimana penguatan ekonomi Desa melalui BUMDes di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu peneliti mampu mendeskripsikan Penguatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian ini dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Jenis Data yang digunakan adalah Data Primer (langsung) adalah data pertama yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yang dianggap berpotensi memberikan informasi yang relevan dan objektif di lapangan. Data primer di peroleh dari Kepala Desa Lamatti Riaja, Direktur Bumdes, Masyarakat Desa Lamatti Riaja yang mengetahui pengelolaan bumdes. Teknik pengumpulan data, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Penyedia informasi adalah orang yang memiliki latar belakang penelitian, yang berperan memberikan informasi tentang lingkungan dan situasi penelitian. Teknik analisis data, reduksi data, representasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di negara kita diperlukan adanya upaya pembangunan ekonomi yang seimbang. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tersebut perlu meningkatkan perekonomian melalui gerakan dan penemuan-penemuan baru, sehingga tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Pembangunan hakikatnya bertujuan membangun kemandirian termasuk pembangunan perdesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah perdesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas keanekaragaman usaha pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi perdesaan.

Kurang efektifnya pelaksanaan program yang sudah ada, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di perdesaan adalah melalui penyatuan pengelolaan kelembagaan ekonomi yang sudah ada Aset ekonomi yang sudah ada didesa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang desa. Dalam UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) kepasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Oleh karena itu Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes dapat didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terhadap permintaan pasar. Sedangkan tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat desa melalui penyuluhan arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan

pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme oprasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal, sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya. Dari pengertian, pendekatan dan pemikiran diatas maka melalui musyawarah Desa Lamatti Riajakecamatan bulupoddo kabupaten sinjai. Maka tanggal 06 Oktober 2017 melalu musyawarah desa terbentuklah kelembagaan yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama BUMDes “MAKKURAGA” Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat dengan melalui pelayanan. Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyertaan modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan minimal, yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan pihak ketiga (baik dalam luar maupun dalam desa).Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, artinya apabila usaha pengelolaan BUMDes berjalan lancar berarti pembagian hasil yang akan dicapai juga besar atau banyak. Di mana hal yang penting dalam upaya peningkatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin kedekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. Dalam mendukung kebijakan desa agar dapat berjalan dengan semaksimal dan efektif adalah bagaimana peran dari desa itu sendiri, terutama melalui peningkatan Pendapatan asli desa (PAD). Hal tersebut dapat dianalisis dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2015.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala desa Lamatti Riaja, Bapak A. Mappaware, pada 1 Juni 2022 mengatakan bahwa: “BUMDes wajib ada di setiap Desa, seperti dalam peraturan Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Maka berdasarkan UU tersebut, berdirinya BUMDes MAKKURAGA yang dibentuk sejak tahun 2017 mampu menjadi alat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan tentunya peran kami sebagai aparat pemerintah desa akan selalu mendukung masyarakat untuk bersama sama mengelola BUMDes dalam peningkatan PAD.

Pendanaan Desa dengan BUMDes itu terpisah, sehingga dalam pengelolaan BUMDes berdiri sendiri, namun masih dalam naungan pemerintah Desa. Terbentuknya BUMDes diharapkan sebagai upaya menjadikan Desa Lamatti Riaja sebagai Desa mandiri secara finansial, sehingga dapat membantu masyarakat. Secara pengelolaan, BUMDes berdiri sendiri namun pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes masuk kedalam anggaran dana Desa yang menjadi pendapatan asli desa (PAD) yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas Desa

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat dan lembaga Desa tersebut sehingga nantinya akan mewujudkan Desa yang mandiri.

Adapun laporan penggunaan anggaran BUMDes dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.3. Penggunaan anggaran BUMDes Makkuraga

No.	Tahun	Anggaran BUMDes	Penggunaannya	Keterangan
1.	2018	40.000.000	Pembelian alat karaoke	Semua anggaran
2.	2019	12.350.000	Pinjaman Pada Usahapandai besi	Semua anggaran
3.	2020	0,00	-	-
4.	2021	133.000.000	- Pembelian Baruga - Pembelian pabrik tahu	- 60 Juta - 73 Juta
5.	2022	185.350.000	0	Belum tersalur

Sumber data : Laporan BUMDes Makkuraga, 2022

Pernyataan diatas diperkuat pula oleh Sekretaris desa, Bapak Muhammad Fadli, pada 1 Juni 2022 yang menyatakan bahwa:“Sebagai aparat desa tentunya kami selalu mensupport pemerintah desa dan mengawal masyarakat, agar bagaimana masyarakat bisa terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Sehingga masyarakat mampu bersama sama untuk berkerja sama dengan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes ini, agar ekonomi mereka mengalami peningkatan.Dan pada kesempatan ini saya bertemu langsung dengan ketua BUMDes, Bapak Sriwanto, pada 1 Juni 2022 di mana beliau mengungkapkan bahwa: Semenjak adanya BUMDes di mana ada usaha industri tahu dan industri sewa karaoke serta baruga, masyarakat di mudahkan dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga mereka sebagai pemuda dan masyarakat di ikut sertakan dalam menjalankan usaha BUMDes sehingga dari di libatkannya pemuda dan masyarakat dapat menambah pendapatan mereka, untuk harga tahu 1.000 per biji sedangkan untuk tempe di jual dengan harga 5.000 per tiga bungkus sedangkan untuk sewa karaoke 300.000 bersih masuk kas dan untuk sewa baruga 700.000 masuk kas”.

Adapun laporan keuangan BUMDes Makkuraga dari 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4. Laporan Keuanagn BUMDes Makkuraga

No.	Tahun	Anggaran BUMDes	Pendapatan	Pengeluaran	Ket.
1	2018	40.000.000	8.250.000	7.425.000	LPJ
2	2019	12.350.000	14.100.00	14.874.500	LPJ
3	2020	0,00	3.558.000	13.652.00	LPJ
4	2021	133.000.000	6.750.00	12.862.000	LPJ
5	2022	185.350.000	0	0	BLM

Sumber data : Laporan BUMDes Makkuraga, 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna BUMDes Ibu Ira, pada 5 Juni 2022 beliau mengungkapkan bahwa: “Masyarakat merasa di mudahkan dalam mendapatkan kebutuhan mereka sangat terbantu dengan adanya usaha BUMDEs Seperti usaha indsutri tahu dan industri sewa karaoke dan baruga dengan harga yang cukup murah di dibandingkan mereka harus keluar yang cukup

memakan biaya ke kota Sinjai. Selain itu masyarakat di mudahkan dalam memenuhi kebutuhan seperti tahu dan tempe di mana harga yang lebih murah, di sisi lain, ini menjadi pemasukan bagi PAD”.

Hal serupa di sampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Bapak Kamri, pada 7 Juni 2022 Beliau mengungkapkan bahwa: “Usaha BUMDes yang masyarakat jalankan di bidang sewa dan industri, sangat membantu masyarakat dalam setiap acara yang di adakan desa dan acara yang di adakan masyarakat sendiri maupun dari luar desa. Dari hasil usaha sewa tersebut mereka mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, maka dari hasil sewa tersebut dapat menambah penghasilan pribadi selain dari pekerjaan sebagai petani dan buruh tani”.

Dari pernyataan diatas diperkuat pula oleh Kaur Keuangan Desa Lamatti Riaja A. Nurkiamah, pada 11 Juni 2022 yang menyatakan bahwa : “Sudah 4 tahun diberikannya modal BUMDes, dan bendahara BUMDes baru satu kali melakukan penyetoran dana PAD ke Desa dengan nilai masih kecil sehingga pada tahun ini pemberian modal BUMDes sementara dihentikan sambil melihat perkembangannya”. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat dari laporan PAD dari BUMDes Makkuraga di bawah ini.

Sehingga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Makkuraga sudah efektif namun dalam hal Pendapatan Asli Desa (PAD) masih sangat sedikit. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh pengelola BUMDes sehingga kurangnya PAD yang masuk ke pemerintah Desa dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bendahara BUMDes, Ibu Mustabsyira pada 20 Juni 2022 di mana beliau mengungkapkan bahwa:

“Dengan adanya Kendala BUMDes yang di dapatkan dilapangan, seperti masih lambat dalam pemberian modal dari Desa sehingga kami susah bergerak cepat dalam menjalankan produk - produk yang direncanakan desa. Dan kami merasa perlu pemberian anggaran yg besar untk modal BUMDes tersebut. Dan diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi dan koreksi terhadap program-program BUMDes yang telah dijalankan”. Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh Ketua BUMDes pada 20 Juni 2022 yang menyatakan bahwa :

“Adapun kendala yang dihadapi BUMDes sehingga kurang PAD yang masuk di Desa dikarenakan tingginya biaya penyusutan barang dan kurangnya minat masyarakat setempat untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh BUMDes Makkuraga”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil usaha BUMDes Makkuraga masih kurang PAD yang dimasukkan di Desa bahkan tergolong tidak ada dengan jumlah PAD hanya sebanyak Rp. 203.000,00 (Dua ratus tiga ribu rupiah) selama 5 tahun. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi dengan tingginya pengeluaran dibandingkan pendapatan BUMDes Makkuraga dimana sebelumnya BUMDes bergerak pada unit usaha penyewaan yang membutuhkan barang inventaris dan harus disusutkan nilai ekonomisnya tiap bulan. Dan juga pada usaha produksi tahu dan tempe yang persentasinya hanya 10% dan usaha ini pun baru berjalan namun kemungkinan PAD akhir tahun 2022 dari usaha BUMDes akan ada karna hasil unit usaha produksi tahu dan tempe.

Terciptanya Lapangan Kerja

Upaya dalam mengurangi pengangguran adalah dengan membuka lapangan pekerjaan melalui kebijakan dan peran pemerintah setempat terutama dengan adanya BUMDes yang di miliki oleh desa. Dengan menciptakan lapangan kerja di desa tentunya pemerintah dapat mencegah jumlah peningkatan angka pengangguran di desa. Oleh karenanya kami mewawancarai beberapa informan mengenai terciptanya lapangan kerja melalui BUMDes desa Lamatti Riaja.

Untuk mengurangi angka pengangguran di Desa maka sebagai pemerintah desa harus melakukan berbagai upaya melalui usaha yang di kelola BUMDes yang di mana pengelola nya adalah masyarakat desa. Berikut hasil wawancara dengan Kepala desa Lamatti Riaja, Bapak A. Mappaware, pada 1 Juni 2022 mengatakan bahwa: “Berbicara bagaimana peran kami sebagai aparat desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan cara membuka berbagai usaha melalui BUMDes seperti usaha industri sewa karaoke, baruga dan usaha industri tahu tempe di mana pengelola dari usaha

ini adalah masyarakat desa Lamatti Riaja itu sendiri, sehingga itu mampu kita rekrut untuk menjadi pengelola dan mampu membuka lapangan pekerjaan di desa kami”.

Demikian pula Pernyataan diperkuat pula oleh Sekretaris desa, Bapak Muhammad Fadli, pada 1 Juni 2022 yang menyatakan bahwa: “Selama ini kami di pemerintahan desa selalu mencari cara agar bagaimana mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat desa lamatti riaja melalu BUMDes Makkuraga, di mana semua pengelolanya adalah asli masyarakat desa Lamatti Riaja, apalagi kebanyakan pekerjaan di masyarakat adalah petani tentunya, kami harus mampu memberikan pekerjaan bagi mereka yang tidak bekerja. Tentunya hasil dari usaha tersebut aka ada keuntungan yang di dapatkan oleh masyarakat sebagai pengelola usaha tersebut untuk membantu ekonomi mereka”. Bapak Sriwanto, pada 6 Juni 2022 di mana beliau mengungkapkan bahwa:“Saat ini sudah ada sepuluh karyawan yang saya rekrut dalam mengelola usaha yang dilakukan BUMDes Makkuraga”.Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat salah satu pengguna BUMDes, menurut ibu Ita, pada 27 Juni 2022 beliau mengungkapkan bahwa:“Saya sebagai masyarakat tentunya sangat merasakan bagaimana lapangan pekerjaan yang ada di desa kami, kami hanya mengharapkan bagaimana pemerintah desa mampu membuka lapangan pekerjaan bagi kami, dengan usaha lain melalui BUMDes Makkuraga, karena apalagi sudah beberapa tahun BUMDes ini berdiri akan tetapi masih banyak pengangguran di desa kami”. Dari pernyataan diatas dapat diperkuat dengan melihat jumlah masyarakat yang terlibat dalam usaha BUMDes tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6. Jumlah karyawan yang terlibat dalam usahaBUMDES Makkuraga

No.	Jenis Usaha	Jumlah Karyawan	Ket.
1	Penyewaan Karaoke	2 Orang *	
2	Penyewaan Baruga	4 Orang	-
3	Produksi Tahu / Tempe	4 Orang	-

Sumber data : Laporan BUMDes Makkuraga, 2022

Dari data diatas diketahui bahwa masih sedikit unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Makkuraga sehingga jumlah pekerja yang dibutuhkan juga masih kurang. Seperti pada unit usaha karaoke hanya mempekerjakan 2 orang saja, 1 sebagai operator dan yang lain hanya ikut membantu dalam hal pengangkutan alat karaoke. Pada unit usaha baruga hanya mempekerjakan 4 orang karena biasa tidak semua baruga yang tersedia digunakan oleh masyarakat sehingga tidak terlalu membutuhkan banyak pekerja untuk membantu melakukan pemasangan.

Sama seperti kedua unit usaha lainnya produksi tahu tempe juga mempekerjakan 4 orang saja, 2 orang bekerja pada proses pembuatan tahu, 1 orang bertugas memanaskan pabrik (dalam hal ini menyalakan tungku) dan 1 orang lagi yang memproduksi tahu begitu pun dengan proses pembuatan tempe. Sedikitnya pekerja yang dibutuhkan dalam proses produksi tahu karena pada saat ini hanya memproduksi 50 Kg kedelai dalam satu kali produksi, dimana kapasitas pabrik mesin maksimal 500 Kg jadi persentasi produksi hanya sampai 10 %. Untuk mengurangi angka pengangguran di Desa maka sebagai pemerintah desa harus melakukan berbagai upaya melalui usaha yang di kelola BUMDes yang di mana pengelolanya adalah masyarakat desa. Akan tetapi dalam melaksanakan setiap kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah desa, ada beberapa kendala yang di hadapi.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala desa Lamati Riaja, Bapak A. Mappaware, pada 1 Juni 2022 mengatakan bahwa: “Selama ini pemerintahan desa lamatti riaja ini telah berusaha keras dalam melaksanakan terciptanya lapangan pekerjaan sebagaimana ketersediaan dana desa untuk BUMDes tersebut, meskipun demikian kenyataan masih terdapat kendala yang di hadapi seperti kekurangan potensi di desa untuk mendukung terciptanya lapangan kerja, sehingga kami selalu berharap dengan usaha yang di kelola BUMDes seperti usaha industri dan usaha sewa yang dapat mengurangi angka pengangguran meskipun tidak begitu banyak.” Pernyataan ketua BUMDes, Bapak Sriwanto, pada 2 Juli 2022 di mana beliau mengungkapkan bahwa:

“Perlu adanya usaha lain melalui BUMDes yang mampu merekrut banyak masyarakat yang pengangguran untuk bekerja dalam pengelolaan usaha BUMDes ini, itu yang masih menjadi kendala bagi pemerintah desa dan masyarakat desa khususnya yang tidak memiliki pekerjaan, karena kalau hanya mengharapkan melalui usaha BUMDes itu tidak seberapa yang bisa di pekerjakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat salah satu pengguna BUMDes, menurut Ibu Ita, beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat tentunya sangat merasakan bagaimana kendala yang di hadapi untuk lapangan pekerjaan yang ada di desa kami, kami hanya mengharapkan bagaimana pemerintah desa mampu menggali potensi yang ada di desa kami untuk bisa di kembangkan dan mampu menjadi kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Lamatti Riaja”. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kendala yang di hadapi BUMDes dalam menciptakan lapangan pekerjaan itu di karenakan masih kurangnya unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Sehingga untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat tentunya Pemerintah Desa Lamatti Riaja melalui Badan Usaha Milik Desa harus memiliki rencana usaha kedepan yang sesuai dengan potensi Desa dan usaha yang cocok yang dikelola oleh BUMDes juga seharusnya melakukan usaha penggemukan sapi dan tentunya hal tersebut dapat mempekerjakan banyak karyawan dan pada akhirnya angka pengangguran yang ada semakin berkurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes Makkuraga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Lamatti Riaja pada khususnya dan semua lingkup masyarakat pada umumnya dengan unit usaha yang di dirikan BUMDes Makkuraga seperti usaha Industri tahu tempe dan Industri penyewaan karaoke dan baruga. Usaha BUMDes mampu memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru. Dengan adanya BUMDes tentunya memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mencari penghasilan guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. BUMDes Makkuraga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat meskipun tidak semua masyarakat mampu di pekerjakan karena masih sedikit unit usaha yang dikelola. Minimnya PAD yang masuk di Desa bahkan terbilang tidak ada karena biaya penyusutan barang yang disisipkan lebih tinggi dibandingkan omset jasa sewa. Pihak pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa kemungkinan memberhentikan sementara pemberian modal BUMDes tersebut sampai melihat ada pemasukan PAD ke Desa karena sudah banyak modal BUMDes yang diberikan untuk dikelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Khairul. (2015). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 13, Nomor 3.
- Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. Jurnal Bina Praja | Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni.
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007,h. 2.

- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative and Quantitative approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
- Cohen, Bruce J. 1992. *Struktur Sosial*. Jakarta: CIFOR
- Eko, Sutoro, dkk (2014) *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, (FPPD
- Eka Cahyani, dkk. (2019) Analisis Pengaruh BUMDes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada BUMDes Silatri Indah Desa Beran Dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh)
- Hikmawati. (2021). Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Didesa Duampanuae Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai
- Haryanto, Eko Sri dkk. 2015. *Tanya Jawab Sekita Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora utama.
- Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil, 2013. *Laporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes Kabupaten Bantaeng 2013*.
- Jaryono, Tohir. (2019), Analisis Kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” Dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Bayumas
- Kurniawati, Dina, dkk. 2019. Peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat Desa di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. (<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/ADR/article/view/754>).
- Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*. Jakarta: Mitra Wacana media.
- Lutfi, Muhammad, et Al. 2020. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi IV Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai*. Sinjai :UMSIpress.
- Muhammad Fajar Nandra Caya, Ety Rahayu.2019. Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung
- Nurmalia, Rika, dkk. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi Desa Abiantuwung. (*Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 8 No. 1, April 2018 ISSN: 2599- 2651*)<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19865>.
- Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.Papan Transparansi Anggaran Desa Lamatti Riaja
- Rosa, Maria. (2016). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. MODUS Vol.28 (2).
- Supriyanto, dkk. 2017. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Studi kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Samawa* Vol 14 No 1, April
- Sembiring, Sentosa, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa, *Kertha P atrika* Volume 39, Nomor 1, April 2017. h.1.
- Sri Kusuma Dewi, Amelia, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pedes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Rural and Development*, Volume V No. 1 Februari 2014, h. 2.

- Suwondo, dkk.(2018). (*Jurnal Keberadaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) sebagai penguatan ekonomi Desa di Desa Landungsari,Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*. Vol. 1, No. 6,Hal. 1068-1076.)<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/189/169>.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Gava Media
- Samardi, dkk. (2015), *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa PecanTebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*
- Teropong Buletin Balitbang Provinsi Jawa Timur, Edisi 101 September-Oktober2018.h. 7. Teropong Buletin Balitbang Provinsi Jawa Timur, Edisi 101 September-Oktober2018.h.8.
- Undang- undangNomor6 Tahun 2014 TentangDesaWintoko, Bambang. 2009. *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah KeuntunganGanda Lingkungan Bersih dan Kemampuan Finansial*, Cet. I,Yogyakarta: Pustaka Baru Pres